



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
SEKRETARIAT KERJA SAMA BILATERAL DPR RI**

Tahun Sidang	: 2025 - 2026
Masa Persidangan	: II
Jenis Rapat	: Rapat Interpares
Sifat Rapat	: Tertutup
Hari/Tanggal	: Senin, 5 Januari 2026
Waktu	: Pukul 14.00 WIB s.d. selesai
Tempat	: Ruang Delegasi BKSAP Gd. Nusantara III Lt. 6 DPR RI
Acara	: 1. Pembahasan Prioritas Kerja Interpares dengan Unit- Unit Kerja terkait; 2. dan lain-lain.
Ketua Rapat	: Rijal Al Huda, M.Ec / Kepala Biro KSAP dan OI
Sekretaris Rapat	: Reny Amir SH., M.M., MLI /Kepala Bagian Set. KSB
Hadir Fisik	: 1. Perwakilan Pusat Analisis Keparlemenan (PUSAKA); 2. Perwakilan Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan (PA3KN); 3. Perwakilan Badan Keahlian (BKD)/ PUU EKRA; 4. Perwakilan dari Pusat Teknologi dan Informasi (PUSTEKINFO); 5. Perwakilan Biro Perencanaan dan Organisasi (RENSI); 6. Perwakilan Biro Organisasi dan Tata Laksana (ORTALA); 7. Perwakilan Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat; 8. Sekretariat KSR; 9. Sekretariat KSI; 10. Sekretariat KSB;

I. Pendahuluan

Kepala Biro KSAP dan OI membuka rapat lanjutan terkait Prioritas Kerja Interpares dengan unit-unit terkait, pertemuan berlangsung secara tertutup (internal) dan berlangsung pada pukul 14.00 WIB.

II. Kesimpulan / Keputusan

1. Kepala Biro KSAP dan OI dengan penjelasan mengenai Prioritas Kerja Interpares. Secara internal, masing-masing unit-unit kerja perlu mencermati poin-poin prioritas yang telah disampaikan, sehingga nantinya dapat ditentukan unit kerja yang menjadi *leading role* dalam prioritas tertentu untuk memberikan paparan kepada pihak mitra-mitra Interpares. Rapat dilanjutkan dengan masukan dan saran dari sejumlah peserta yang hadir.
2. Perwakilan PUSAKA yang hadir menyampaikan bahwa keterlibatan unit ini dalam Prioritas Pertama *Legislative Openness and Public Outreach* lebih tepat difokuskan pada analisis hasil akhir kegiatan, bukan sebagai pelaksana teknis kegiatan *outreach* kepada masyarakat. Apabila ditugaskan untuk terlibat langsung, terdapat keterbatasan dari sisi concern terhadap keterlibatan publik. Namun demikian, pihaknya menilai kegiatan *Staff Capacity Development: AGORA Platform e-learning on Open Parliaments* tetap penting untuk dilaksanakan. Selain itu, disarankan agar sesi daring (online) dapat dibuka untuk khalayak yang lebih luas mengingat workshop yang dibahas bersifat strategis dan relevan secara publik.
3. Terkait Prioritas Ketiga *Effective Budget Oversight*, Perwakilan PA3KN mempertanyakan terkait *in-person conference*. Selain itu terkait tindak lanjut hasil audit, khususnya terkait terminologi "*tools for members and staff*" serta aspek accountability dan budget audit. Disampaikan bahwa sebagai lembaga legislatif, secara umum DPR RI berada pada posisi pasif dan menunggu hasil audit resmi dari lembaga audit yang berwenang. Menanggapi hal tersebut, BKSAP memahami keterbatasan ketersediaan waktu Anggota Dewan untuk mengikuti kegiatan *in-person conference* dan akan melakukan klarifikasi lebih lanjut terkait partisipasi yang memungkinkan. Terkait audit, BKSAP mencatat bahwa sistem audit di parlemen-parlemen Eropa memiliki perbedaan mendasar dengan Indonesia, namun isu audit tetap akan menjadi perhatian dalam diskusi lanjutan.
4. Perwakilan BKD mengangkat beberapa isu, antara lain keterkaitan kegiatan dengan Open Government Partnership (OGP), cakupan peserta (apakah terbatas pada bidang PUU Ekra atau dapat melibatkan multi-stakeholders), serta inklusivitas skema *one-on-one* mentoring. BKD juga meminta kejelasan

terkait bahan yang perlu disiapkan untuk kegiatan pada 19 Januari, termasuk penanggung jawab penyusunannya. Menganggapi hal tersebut, BKSAP menjelaskan bahwa kegiatan tidak secara langsung berada dalam kerangka OGP, meskipun Indonesia juga tergabung dalam OGP Global. Praktik percontohan di bidang ekonomi dan keuangan (Ekra) dapat ditampilkan sebagai referensi bagi parlemen mitra. BKSAP juga akan meminta informasi spesifik mengenai struktur unit pendukung di parlemen mitra, apakah bersifat *embedded*, lembaga tersendiri, atau *think tank*. Tidak ada pembatasan jumlah peserta untuk sesi daring, namun diperlukan *dedicated person* yang mengikuti rangkaian kegiatan secara konsisten. Terkait mentoring dan penyusunan bahan, BKSAP akan melakukan klarifikasi lebih lanjut, termasuk apakah materi dapat mewakili satu bagian atau lintas unit.

5. Perwakilan Pustekinfo mengusulkan agar target audiensi diperluas dengan melibatkan Biro RENSI serta ORTALA. Dalam konteks pengembangan kecerdasan buatan (AI), disarankan agar Biro Hukum dilibatkan, khususnya untuk aspek *ethical AI*. Penyusunan *Digital Strategic Plan* dinilai idealnya dilakukan dalam jangka waktu tiga bulan, serta disarankan adanya skema *shadowing* dengan Parlemen Rumania. Menanggapi hal ini, BKSAP mencatat untuk ditindaklanjuti dalam perumusan desain kegiatan dan penentuan unit-unit yang perlu dilibatkan secara lintas fungsi.
6. Perwakilan Biro RENSI menanyakan ruang lingkup pemanfaatan AI, apakah terbatas pada proses persidangan atau dapat diperluas ke fungsi lain, serta perlunya melibatkan unit kerja terkait dalam implementasinya. Pihak perencanaan juga perlu mengetahui bagaimana mitra Interpares menentukan mekanisme budget di parlemennya masing-masing. Selanjutnya Perwakilan Biro ORTALA menyampaikan bahwa pihaknya perlu mengetahui bagaimana struktur organisasi beserta tupoksinya secara umum pada setiap parlemen mitra Interpares.
7. Perwakilan PUU-EKRA menanyakan mekanisme pelaksanaan pilot project sebagai bagian dari Prioritas 1, khususnya apakah praktik serupa telah diterapkan di parlemen negara mitra. Selain itu, disampaikan pertanyaan terkait mekanisme penetapan narasumber dari pusat-pusat di bawah BKD. Menanggapi hal tersebut, BKSAP menjelaskan bahwa penetapan narasumber akan dilakukan melalui surat resmi kepada Kepala Badan (Kaban), yang selanjutnya akan menunjuk pusat yang paling relevan dan tersedia. Penunjukan Person in Charge (PIC) di masing-masing unit kerja akan diserahkan kepada unit terkait, dengan penekanan pada keterlibatan yang konsisten dan *dedicated* sepanjang rangkaian kegiatan.

8. Informasi tambahan, disampaikan bahwa telah terdapat kebijakan dari Sekretariat Jenderal DPR RI terkait Sistem Legislasi (Sileg), dengan koordinasi berada di bawah Badan Legislasi (Baleg).

III. Penutup

Rapat ditutup pukul 14.55 WIB dengan ucapan terima kasih atas masukan dan pertanyaan dari seluruh peserta.

Jakarta, 5 Januari 2026

a.n. Ketua Rapat

Sekretaris Rapat,



Reny Amir, S.H., M.M., MLI 

197305121992032001